

## **BAB V**

### **Kesimpulan**

Seperti negara-negara lain, Republik Turki juga telah menjalin kerja sama ekonomi melalui perjanjian perdagangan bebas dengan beberapa negara secara bilateral, seperti perjanjian perdagangan bebas dengan Israel, Macedonia, Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Palestina, Maroko, Tunisia, Mesir, Albania, Georgia, Montenegro, Serbia, Chile, Yordania, Korea Selatan, dan Mauritius. Selain itu, Turki juga menjalin kerja sama ekonomi dengan Jepang dan hubungan bilateral antara Turki dengan Jepang semakin intens sejak dekade terakhir.

Dimulainya kerja sama ekonomi oleh Turki dengan negara-negara lain, tidak terlepas dari pengaruh orang-orang yang ada di pemerintahan Turki. Pada masa sebelum tahun 2000 masalah ekonomi belum menjadi fokus utama pemerintah Turki. Namun sejak terjadi krisis ekonomi yang sangat parah dalam sejarah Turki di tahun 2001, masalah ekonomi baru dirasa penting. Masyarakat Turki tidak puas dengan pemerintahan yang berkuasa saat itu karena dinilai gagal dalam mencari solusi untuk masalah krisis ekonomi. Krisis ekonomi tersebut menyebabkan pengangguran, banyak perusahaan skala kecil menjadi bangkrut, yang menjadikan krisis ekonomi ini dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat Turki, baik kelas menengah atas maupun masyarakat kelas bawah. Masyarakat Turki mulai mencari sosok baru yang mampu membawa perubahan untuk Turki secara menyeluruh. Di saat itu, mereka mulai melirik tokoh-tokoh dari partai keadilan dan pembangunan atau dalam bahasa Turki disebut *Adalet ve Kalkinma Partisi* (AKP).

Hubungan bilateral antara Turki dan Jepang tampak selalu berjalan mulus. Bahkan saat Perang Dunia II terjadi dan Turki memutuskan untuk bergabung melawan pihak Axis, yang berarti Turki secara resmi bergabung melawan Jepang, kedua negara tidak bertemu secara langsung di medan perang. Kedua negara saling membantu jika salah satu mengalami kesulitan, seperti pemerintah Turki yang memerintahkan pesawat *Turkish Airlines* untuk mengevakuasi warga Jepang dari Iran saat Perang Teluk dan Pemerintah Jepang yang mengirim bantuan material dan tenaga medis saat Turki mengalami bencana alam berupa gempa bumi. Memasuki abad ke 21, fokus kerja sama dalam hubungan Turki dan Jepang adalah pada bidang ekonomi. Turki berusaha meningkatkan investasi dari Jepang dan Jepang terus berinvestasi pada perusahaan-perusahaan di Turki dan pada proyek-proyek besar di Turki. Pada tahun 2010, Jepang berkontribusi dalam melakukan investasi langsung di Turki dengan jumlah investasi sebesar \$ 347 Juta atau 5,3% dari jumlah seluruh investasi asing langsung di Turki. Saat itu ada sekitar 162 perusahaan Jepang yang melakukan bisnis di Turki dengan modal dari Jepang. Di tahun 2013, Turki membuat kesepakatan dengan Jepang dalam hal Kerja sama Proyek Sinop, di mana akan dibangun reaktor nuklir di Turki dengan bantuan dari Jepang. Proyek Sinop adalah simbol dari peningkatan hubungan baik antara Jepang dan Turki, serta mampu menjadi penguat hubungan bilateral antara Turki dan Jepang. Kemudian pada acara peresmian proyek terowongan Marmaray, Shinzo Abe mengatakan bahwa proyek tersebut telah berhasil dicapai berkat kerja sama antara peralatan berteknologi tinggi dari Jepang dan tenaga kerja yang berpengalaman dari Turki. Kedua negara terus berkomitmen untuk terus meningkatkan hubungan kerja sama antara Turki dan Jepang ke tingkat yang lebih tinggi, terutama di bidang ekonomi.

Perundingan dengan Jepang terkait peningkatan kerja sama ekonomi bilateral ini semakin serius dengan dimulainya perundingan untuk *Japan-Turkey Economic Partnership Agreement (EPA)*. Negosiasi antara Turki-Jepang tentang EPA telah dimulai sejak Desember 2014.

Turki menjalin hubungan kerja sama dengan Jepang dalam EPA di saat neraca perdagangan bilateral Turki dengan Jepang tidak seimbang. Neraca perdagangan bilateral kedua negara lebih didominasi oleh Jepang.

Menurut William D Coplin dalam membuat kebijakan luar negeri, para pembuat kebijakan dipengaruhi oleh tiga pertimbangan yaitu; pertama, kondisi politik dalam negeri, kedua, kondisi atau kemampuan ekonomi dan militer dan ketiga, konteks internasional yaitu posisi suatu negara dalam berinteraksi dengan negara lain.

Kondisi ekonomi dan militer juga menjadi aspek penting yang mempengaruhi para pembuat kebijakan luar negeri di satu negara. Coplin menjelaskan bahwa kemampuan ekonomi dan militer dapat memberikan keuntungan kepada negara tersebut dalam berhubungan dengan negara lain, dengan memberikan dukungan maupun tuntutan kepada para pembuat kebijakan luar negeri.

Dalam memulai EPA dengan Jepang, kondisi ekonomi Turki mempunyai pengaruh yang besar sebagai bahan pertimbangan dibandingkan dengan kondisi militer. Ini karena pemerintah Turki sejak AKP berkuasa, memprioritaskan pertumbuhan ekonomi Turki melalui kebijakan liberalisasi ekonomi. Terlebih lagi, situasi politik Turki telah mengalami perubahan, yaitu tidak adanya intervensi dari pihak militer Turki. Selain itu, Kebijakan luar negeri Turki semakin didorong oleh

aktor ekonomi dan masyarakat sipil. Kondisi ekonomi yang menjadi faktor pertimbangan dalam kebijakan luar negeri Turki adalah kondisi pasar ekspor, peluang investasi, pariwisata, dan ketersediaan energi. Neraca perdagangan antara Turki dan Jepang memang masih tidak seimbang, dengan nilai ekspor Jepang ke Turki jauh lebih besar jika dibandingkan dengan nilai ekspor Turki ke Jepang. Namun, ekspor dari Turki ke Jepang terus meningkat setiap tahunnya. Selain itu, komoditas yang paling banyak di ekspor ke Jepang merupakan komoditas agrikultur yang selalu dibutuhkan oleh Jepang, sehingga Turki dapat memperoleh keuntungan secara terus-menerus karena Turki secara tradisional merupakan negara agraris, yang mampu memenuhi kebutuhan agrikulturnya secara mandiri.

Berdasarkan penjelasan Coplin, kebijakan luar negeri adalah hasil dari kondisi dalam negerinya, atau dapat dikatakan bahwa kebijakan luar negeri satu negara merupakan hasil dari interaksi antara para pembuat kebijakan luar negeri dengan para aktor-aktor politik dalam negerinya yang berusaha mempengaruhi sebuah kebijakan luar negeri. Aktor-aktor tersebut oleh Coplin disebut sebagai *policy influencer* yaitu mereka yang berusaha mempengaruhi para pembuat kebijakan.

Dalam isu ini, tidak semua *policy influencer* memiliki pengaruh dalam keputusan Turki untuk menjalin kerja sama EPA dengan Jepang. Adalah Menteri Ekonomi Turki yang menjabat yaitu Zafer Çağlayan yang berkunjung ke Jepang pada Juli 2012 untuk bertemu dengan Menteri Ekonomi Jepang Yukio Edano dan Menteri Luar negeri Jepang Koichiro Gamba. Dari pertemuan tersebut, kedua pihak menandatangani “*Memorandum on Establishing a Framework for Cooperation in Economic Relations between the Government of Japan and the Government of the*

*Republic of Turkey*”, kemudian ketiga menteri tersebut kemudian memutuskan untuk membentuk sebuah kelompok studi bersama (joint study group) untuk mempelajari prospek dari dimulainya negosiasi mengenai EPA antara Turki dan Jepang. Setelah melakukan dua kali pertemuan, kelompok studi bersama ini kemudian merekomendasikan kepada kedua negara untuk segera melakukan kerja sama dalam EPA.

Jepang merupakan mitra tertua Turki di Asia, dan hubungan antara kedua negara selalu baik dan tidak pernah ada ketegangan. Hubungan kerja sama ekonomi antara Turki dan Jepang semakin kuat, ini dimulai sejak awal tahun 2012 saat Menteri Luar Negeri Jepang Koichiro Gamba berkunjung ke Turki pada Januari 2012 Menteri Gamba menyatakan akan memperkuat hubungan Turki dengan Jepang. Wacana untuk meningkatkan hubungan kerja sama Turki dan Jepang kemudian direalisasikan pada bulan Juli 2012, dengan ditandatanganinya Memorandum yang telah dibahas sebelumnya yaitu “*Memorandum on Establishing a Framework for Cooperation in Economic Relations between the Government of Japan and the Government of the Republic of Turkey*”. Kemudian kedua negara membentuk “*Japan-Turkey EPA joint study group*” yang bertugas untuk membahas peluang-peluang yang didapat dalam pelaksanaan kerja sama ekonomi kedua negara dalam EPA. Hal ini yang menjadi bakal dimulainya EPA antara Turki dan Jepang.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan yang telah diuraikan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan Turki untuk menjalin kerja sama dengan Jepang dalam *Japan-Turkey Economic Partnership Agreement* didorong oleh beberapa faktor yaitu, dari kementerian Ekonomi Turki yang berusaha meningkatkan

investasi dari Jepang, dan perdagangan hasil agrikultur Turki yang selalu dibutuhkan oleh Jepang yang terus meningkat setiap tahunnya, serta keinginan kedua negara untuk meningkatkan hubungan kerja sama bilateral ke tingkat yang lebih tinggi.